

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal dari Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangandaerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan

daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut Halim di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan EmyIryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Menurut Warsito di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal. 23.

<sup>7</sup> Ibid, hal 24.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Sumber keuangan pada masa Rasulullah SAW pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.

Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendapatan asli daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan Negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-

dlarar al-khaas li daf'I dlararin aam" (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I'tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allahta'ala berfirman, dalam Al-Qur'an Al-Hujurat 49:15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُّكْمِلِينَ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَوْ كُنْتُمْ كَاهِنًا لَأَنْتُمْ كَاهِنًا

Artinya: orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar".<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat: 41.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ كَاهِنًا لَأَنْتُمْ كَاهِنًا

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

## b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 190.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu<sup>9</sup>:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
  - a. Hasil Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
  - b. Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 157

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.<sup>10</sup> Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.<sup>11</sup>

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi.
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga

---

<sup>10</sup> Hanif Nur kholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal 184.

<sup>11</sup> Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 40.

- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
- e. asing, dan
- f. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## 2. Konsep Kesejahteraan

### a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat.<sup>10</sup> Dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan baik dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam kondisi sehat, damai, makmur dan selamat. Dalam artian yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang tentram secara lahiriah maupun batiniah.

Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

---

<sup>12</sup> Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011), hlm.22

layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.<sup>13</sup>

World Health Organization (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, standard dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.<sup>14</sup>

Menurut Rambe dalam buku Euis Sunarti, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality humen*

---

<sup>13</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Pratama, 2015), hlm.86

<sup>14</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.44

<sup>15</sup> Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan*, (Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2005), ISBN 978-602-866505-6, hlm. 15



*life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.<sup>16</sup>

#### **b. Indikator Kesejahteraan**

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitikberatkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Dijelaskan dalam pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 sebagai berikut:

##### 1) Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

##### 2) Keluarga Sejahtera I

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm.15

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan KB.

### 3) Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.

### 4) Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.

### 5) Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah

---

<sup>17</sup> Zaenal Tanjung, "Peranan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana IAIN Rden Intan Lampung), 2016. hlm. 42

tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

2) Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat penempatan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan

bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

#### 4) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.<sup>18</sup>

### 3. Indeks Pembangunan Manusia

#### a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (*United Nations Development Programme*), memberikan pengertian bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup

---

<sup>18</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), hlm. 96

dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995:103)<sup>19</sup>, sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- 2) Pembangunan dimaksudkan tersebut untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- 3) Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

---

<sup>19</sup> UNDP: *United Nation Development Programme*, 1995: 103

Konsep pembangunan yang fokus pada manusia, pembangunan harus dilakukan secara seimbang. Seimbang antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Artinya bahwa pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan kemampuan manusia saja, misalnya kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, umur yang lebih panjang ataupun memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Namun juga harus memperhatikan bagaimana manusia memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang dapat meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik, misalnya dengan memanfaatkan kemampuannya untuk bekerja.<sup>20</sup>

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran

---

<sup>20</sup>BPS Polewali Mandar , *Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015*, h. 7

perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.<sup>21</sup>

## b. Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan dan daya beli.

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{indeks harapan hidup}) + 1/3 (\text{indeks pendidikan}) + 1/3 (\text{indeks daya beli}).^{22}$$

Skor Indeks Pembangunan Manusia ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu negara. Demikian pula sebaliknya. Indeks Pembangunan Manusia ini oleh UNDP dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) *Very high HDI*: untuk nilai IPM  $\geq 0.800$
- 2) *High HDI*:  $0.700 \leq \text{nilai IPM} < 0.800$
- 3) *Medium HDI*:  $0.550 \leq \text{nilai IPM} < 0.700$
- 4) *Low HDI*: nilai IPM  $< 0.550$ <sup>23</sup>

Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya dikembangkan seterusnya saja akan tetapi juga harus menjalani pengukuran pencapaian

---

<sup>21</sup>Yunita Mahrany, *Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan*. Jurnal. 2012, h. 15

<sup>22</sup>Beik Syauqi Irfan, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2016, h. 147

<sup>23</sup>Ibid, h. 148

dari keseluruhan baik daerah maupun negara. Dalam tiga dimensi pembangunan, yaitu lama hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiganya diukur dengan menggunakan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pengeluaran perkapita.<sup>24</sup>

Indeks Pembangunan Manusia jika dilihat dari pengeluaran perkapita saja, berarti hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah atau negara. Alasannya adalah pengeluaran per kapita atau pendapatan per kapita merupakan simbol dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan per kapita masyarakatnya. Berdasarkan pendapatan per kapita per tahun berarti tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat ditekan sesuai dengan pendapatan per kapita. Maka dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat.<sup>25</sup>

### c. Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia

Indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia menurut *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) setiap tahun sejak 1996 telah menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (*human development index-HDI*) terdiri dari:

#### 1) Indeks Kesehatan

Indikator yang mewakili dalam indeks pembangunan manusia adalah umurharapan hidup waktu lahir. Angka Harapan

---

<sup>24</sup>UNDP, 2004, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Diunduh pada tanggal 29 Desember 2016, Gowa: Samata

<sup>25</sup>Lihat Yunitasari, *Analisis Hubungan Komponen indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Bogor: 2010



Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan kesehatan di suatu negara maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut.<sup>26</sup>

Angka Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Usia harapan hidup bisa panjang jika status kesehatan, gizi, dan lingkungan yang baik.<sup>27</sup>

Derajat kesehatan penduduk suatu wilayah secara umum dapat dilihat dari rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah angka harapan hidup waktu lahir ( $e_0$ ). Hasil indikator komposit yang berkaitan dengan Usia Harapan Hidup ternyata dalam menghasilkan angka-angkanya menunjukkan hasil pembangunan kesehatan masyarakat yang berhubungan langsung

---

<sup>26</sup>Beik Syauqi Irfan, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) 2016, h. 147

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat*. 2015

dengan peningkatan usia harapan hidup suatu daerah. Indeks ini sebagaimana HDI merupakan indikator komposit khusus dapat menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan.<sup>28</sup>

## 2) Indeks Pendidikan

Indikator utama untuk mengukur derajat pendidikan yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia sekaligus tingkat keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.<sup>29</sup>

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.<sup>30</sup> Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya.

---

<sup>28</sup> Arali, *Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat*, 2008, [www.google.com](http://www.google.com)

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar*. 2015, h. 48

<sup>30</sup> Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi 2*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara). 2000, h. 165

Teori Human Capital mengatakan bahwa populasi yang berpendidikan merupakan penduduk usia produktif, teori Human Capital menekankan bagaimana pendidikan meningkatkan teori produktifitas dan efisiensi pekerja dengan meningkatkan tingkat stok kognitif kemampuan pekerja manusia produktif secara ekonomi yang merupakan produk dari kemampuan bawaan dari investasi pada manusia. Penyediaan pendidikan formal dipandang sebagai investasi modal manusia yang dianggap sama atau bahkan lebih berharga dari modal fisik.

### 3) Indeks Daya Beli

Indikator daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup manusia, indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada serta untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produksi sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada akan menciptakan pengeluaran atau konsumsi.

Pengeluaran per kapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.<sup>31</sup>

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun, data pendapatan yang akurat sulit diperoleh sehingga dalam kegiatan

---

<sup>31</sup>Yunita Mahrany, *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*. Jurnal, 2012, h. 23.

SUSENAS data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya yang dilihat dari segi ekonomi. Distribusi pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (daya beli). Di negara berkembang dengan tingkat gizi yang masih rendah, pemenuhan kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar untuk hidup masih merupakan prioritas utama.

#### **4. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam**

##### **a. Definisi Kesejahteraan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Istilah kesejahteraan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan kemajuan jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tertentu, seperti Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedangkan pertumbuhan mengacu kepada masalah negara maju.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, H. 19

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Kalau kita tinjau dari sejarah pada zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul mal.

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafau ar-Rasidindengan mengeluarkan dana Baitulmal. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

- 1) Penyebaran Islam.
- 2) Pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Pengembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Pembangunan infrastruktur.
- 5) Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.
- 6) Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Dari sejarah singkat yang penulis kutip di atastentang kebijakan pemerintah yang diambil dalam pertumbuhan ekonomi pada permulaan Islam, kita bisa melihat bahwa peranan setiap individu sangat berarti

bagi perkembangan ekonomi. Dalam hal ini Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi:

- 1) Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- 2) Mensejahterakan keluarga.
- 3) Membantu orang lain yang membutuhkan.

Masyarakat madani atau industri yang ideal berdasarkan Qur'ani dibangun dengan landasan:<sup>33</sup>

- 1) Kebersamaan dan tolong-menolong dalam segala aktifitas pembangunan.
- 2) Keadilan dan kebijakan.
- 3) Amar ma'ruf nahi mungkar menuju kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
- 4) Berakhlak Islam.
  - (a) Menunaikan amanah.
  - (b) Menunaikan janji.
  - (c) Memperbaiki hubungan antar manusia.
  - (d) Larangan mengkhianati amanah.

---

<sup>33</sup> Ibid

(e) Larangan menghina dan meremehkan.

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- 2) Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
- 3) Menjaga hukum dan ketertiban.
- 4) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi..
- 5) Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.<sup>34</sup>

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti yang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

#### b. Tujuan Syariah Dalam Kesejahteraan Ekonomi

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketikaseluruh kebutuhan dan

---

<sup>34</sup> Lalu Muhammad Iswandi, Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam, (Ntb, Iai Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013) h. 374 -376

keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek meterial maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami bagaimana mencapai tujuan hidup,yaitu pertama tujuan untuk mencapai falah dan kedua tujuan mashlahah.

#### 1) Falah

Secara liter alfalah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan hidup. Menurut Islam falah dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapa melalui realisasi yang seimbangan antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan output total semata mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimumkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permaian yang fair pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan yang seperti inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid asy-syariah).

#### 2) Mashlahah

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang sehingga akan menyebabkan dampak yang disebut



mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Tujuan utama dalam syari'at Islam yang juga merupakan tujuan ekonomi Islam menurut As-Shaitibi adalah mencapai kesejahteraan manusia dan terletak pada perlindungan terhadap lima ke-mashlahah-an, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.<sup>35</sup>

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu falah dan terutama mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam Q.S At-Taubah (9):105:<sup>36</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَلَّهْتُمْ كَمَا رَسَوْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسُرُدُّوْا بِالْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya” Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata,lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa

<sup>35</sup> Rusmala Dewi, Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan, Lampung 2016), h.67-69

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 163

maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spritual manusia.

Beberapapemahamanpokokmengenaipertumbuhanekonomiyang dilihat dari perspektifIslam diantaranya mengenaibatasententang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, di mana yangdimaksuddenganpersoalanekonomi yaitupersoalankekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Menurut Abdurrahman Yusro<sup>37</sup>, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh 10-12:<sup>38</sup>

فَقُلْنَا سَتَّغِفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا  
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُمَدَّرًا  
وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ لِيَبْنُوا وَيَجْعَلَكُمْ حُتُوتًا وَيَجْعَلَ كَمَا نَهَرًا

Artinya: maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

<sup>37</sup> ibid

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005) h.455

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q. S Al-Ar'raaf(7) 96:<sup>39</sup>

وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَيْنَاهُم بِالْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ كَانُوا يُكْسِبُونَ

Artinya : Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (mintak ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai – nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muhammad Taufiq<sup>40</sup> tahun 2019 dengan tujuan mengetahui efektifitas alokasi PAD Kabupaten Ponorogo serta efektifitas tersebut sesuai pandangan Ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif pada kajian pandangan Ekonomi Islam. Penelitian dilakukan pada laporan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo serta pada kajian kepustakaan tentang Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 129

<sup>40</sup> Muhammad Taufiq. *Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Ekonomi Islam*. (Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2019).

bahwa, (1) efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo didominasi kondisi Sangat Efektif pada tahun 2013-2018 menunjukkan alokasi PAD sudah efektif dan berjalan sangat baik. (2) Efektifitas alokasi Penpadatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Hal tersebut terjadi karena alokasi yang dilakukan sesuai denganfalah dan dikembalikan kepada masyarakat atau umat sehingga sudah sesuai dengan kajian Ekonomi Islam.

Penelitian Dewi Rahayuningtyas<sup>41</sup> tahun 2017 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah di Kab/Kota di DIY. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara simultan dan parsial tidak signifikan dengan alokasi belanja daerah di Kab/Kota di DIY.

Penelitian Dwi Puspitasari<sup>42</sup> tahun 2017 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten OKU Selatan tahun 2012 – 2016 Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) dan variabel independen yaitu

---

<sup>41</sup> Dewi Rahayuningtyas. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2005-2014*. (Prodi Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

<sup>42</sup> Dwi Puspitasari. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2015*. (Prodi Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Raden Intan, Lampung. 2017).

Pendapatan Asli Daerah (X). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil uji T menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten OKU Selatan. Semakin tinggi tingkat PAD maka pertumbuhan ekonominya akan semakin meningkat, hal ini bisa dilihat pada  $T_{hitung} > T_{tabel}$  sebesar  $3,042 > 0,016$ , dan nilai signifikannya lebih kecil dari  $0,05$  atau nilai signifikannya  $0,16 < 0,05$ . Tujuan syariah dalam pertumbuhan ekonomi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam Islam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor SDM dan faktor Teknologi.

Penelitian Anim Rahmayanti dan Imanda Firmantyas<sup>43</sup> tahun 2018 dimana hasilnya didapatkan bahwa tingkat signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,001 < 0,005$ . Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa tingkat signifikansi Dana Alokasi Umum sebesar  $0,112 > 0,005$  artinya Dana alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Khusus juga tidak

---

<sup>43</sup> Anim Rahmayanti dan Imanda Firmantyas. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol. 1 No. 1 Januari-Mei 2018.

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi  $0,116 > 0,005$ . Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil yang tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi  $0,836 > 0,05$ .

Penelitian Nyoman Trisna Erawati dan Leny Suzan<sup>44</sup> tahun 2015 dimana hasilnya didapatkan bahwa hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji parsial keempat komponen pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara umum, tidak berpengaruhnya ketiga komponen pendapatan asli daerah dikarenakan pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah tersebut berfluktuatif sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung cukup stabil.

Penelitian Hestu Sarkoro<sup>45</sup> tahun 2016 dimana hasilnya didapatkan bahwa secara parsial bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu Belanja Daerah dan hipotesis keempat (H4) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H1 dan H4 diterima. Sedangkan, hipotesis kedua (H2) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan hipotesis ketiga (H3) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK)

---

<sup>44</sup> Nyoman Trisna Erawati dan Leny Suzan. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *Jurnal e-Proceeding Manajemen*. Vol. 2 No. 3 Desember 2015.

<sup>45</sup> Hestu Sarkoro. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1), 2016.

tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H2 dan H3 ditolak. Sedangkan, secara simultan bahwa Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian Putu Gede Mahendera dan I Gusti Ketut Agung<sup>46</sup> tahun 2015 dimana hasilnya didapatkan bahwa setiap daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diduga sumber pendapatan yang disebutkan mampu memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini adalah simpulan dari beberapa penelitian yang sama dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar PAD, DAU dan DAK dapat meningkatkan IPM. Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Penelitian Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi<sup>47</sup> tahun 2016 dimana hasilnya didapatkan bahwa uji hipotesis menunjukkan PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh positif dan signifikan ini berarti semakin meningkat PAD dan Belanja Modal, maka peningkatan IPM juga meningkat. Terjadinya peningkatan disebabkan oleh pengalokasian Pendapatan

---

<sup>46</sup> Putu Gede Mahendera dan I Gusti Ketut Agung. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. 11.3 (2015).

<sup>47</sup> Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 15.3. Juni (2016).

Asli Daerah dan Belanja Modal telah dimanfaatkan dengan tepat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian Frangky Martinus Mea<sup>48</sup> tahun 2017 dimana hasilnya didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011 -2015 masih di bawah 50 persen dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 persen atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Hal ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk masih kurang yang tergambar dari tingkat pendapatan per kapita yang masih kurang dan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Analisis tren pajak daerah untuk tahun 2016-2020 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga masih perlu ditingkatkan.

Penelitian Gede Ferdi W dan IG. Ayu Nyoman Budiasih<sup>49</sup> tahun 2016 dimana hasilnya didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan PAD, DAU, dan DBH dalam membiayai Belanja Modal tidak mempengaruhi capaian IPM. Namun Dana Alokasi Khusus menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif pada IPM. Hal tersebut mengindikasikan semakin besar DAK dalam membiayai Belanja Modal maka akan dapat menurunkan capaian IPM.

---

<sup>48</sup> Frangky Martinus Mea, dkk. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agri-Sosial Ekonomi Unsrat*. Vol. 13. 2A. Juli, 2017.

<sup>49</sup> Gede Ferdi W dan IG. Ayu Nyoman Budiasih. Pengaruh Pendapat Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16.3. September (2016).



Penelitian Lily Kusumawati dan IG. Bagus Wiksuana<sup>50</sup> tahun 2018 dimana hasilnya didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

### C. Kerangka Konseptual

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel (X) atau lebih terhadap variabel (Y).



Apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan baik secara jumlah dan kualitas maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan pendapatan asli daerah dengan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah (X) terhadap kesejahteraan

<sup>50</sup> Lily Kusumawati dan IG. Bagus Wiksuana. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Journal Manajemen Unud*. Vol. 7 No. 5. 2018.

masyarakat (Y), selanjutnya pendapatan asli daerah akan di analisis dalam prespektif ekonomi syariah.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya.

Dari latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori dapat dirumuskan dalam hipotesis dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji:

H<sub>1</sub> : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah di Provinsi Jawa Timur